

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan menggali tentang wacana *tone deaf* dalam perlawanan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di platform media sosial TikTok. Fokus penelitian ini terletak pada wacana apa yang dibawakan dalam video-video konten TikTok yang membahas masalah *tone deaf* dalam perlawanan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Mengingat munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah baru yang terjadi di Indonesia saat 2025 yang dinilai meresahkan masyarakat. Membuat keadaan politik di Indonesia banyak dibicarakan oleh publik.



Gambar 1. Data Statistik Pengguna TikTok di Dunia Menurut We Are Social dan Meltwater

Sumber: dataloka.id

Indonesia menduduki negara dengan peringkat tertinggi pengguna aplikasi TikTok di dunia. Berdasarkan data yang diambil dari *We Are Social* dan *Meltwater*, jumlah pengguna TikTok di Indonesia per bulan Juli pada tahun 2025 adalah sebanyak 194,37 juta pengguna aktif (Dataloka, 2026). Angka tersebut membawa Indonesia menduduki peringkat pertama melampaui negara besar seperti Amerika Serikat yang mempunyai total pengguna sebanyak 146,07 juta. Lebih lanjut, data

dari internal TikTok menyebutkan bahwa sekitar 72% pengguna TikTok di Indonesia menonton setidaknya satu video *hard news* seperti berita politik, ekonomi, dan lain-lain dan 54% menonton setidaknya lebih dari 3 video berita setiap hari di halaman *FYP* mereka (Riyanto & Pertiwi, 2025). Dari data yang ada menunjukkan bahwa platform TikTok tidak hanya sebagai platform hiburan semata, melainkan bertransformasi menjadi ruang publik digital untuk aktif berpartisipasi di dunia politik.

Besarnya persentase pengguna TikTok Indonesia dalam melihat video tentang berita politik dan sosial turut membuktikan bahwa platform hiburan tersebut juga berfungsi sebagai ruang berpolitik digital. Sebagai ruang wacana digital, warganet di TikTok tidak bisa lepas dari konteks krisis kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang menyangkut tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Meskipun sekarang Indonesia telah memasuki era reformasi yang mana kebebasan dan kedaulatan rakyat sudah dijanjikan, data dan observasi mengenai kesadaran politik masyarakat ternyata masih menunjukkan tingkat yang belum stabil dan optimal (Zahro et al., 2023). Fenomena ini dapat dilihat dari adanya kelompok masyarakat yang menunjukkan sikap apatis terhadap isu-isu politik. Mereka cenderung memilih untuk tidak terlibat dalam proses berdemokrasi. Kondisi ini yang akhirnya dapat menimbulkan tanda tanya mengenai pendidikan politik dan nilai demokrasi masyarakat Indonesia.

Melansir dari artikel berita RMOL Jateng (Wilfridus, 2025) kurangnya demokrasi di masyarakat terjadi karena sistem demokrasi yang awalnya untuk membela rakyat, berubah jadi kenyataan yang dirusak oleh para elit politik yang

hanya mengejar kekuasaan saja. Hal tersebut disebabkan oleh perilaku elit politik yang sering melanggar peraturan seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan lain sebagainya. Sehingga mengakibatkan demokrasi di Indonesia melemah dan membuat masyarakat merasa jauh dari politik. Mereka menjadi kurang percaya lagi dengan sistem yang ada sehingga kesadaran politik warga jadi sulit berkembang karena aspirasinya sering terabaikan.

Meski golongan masyarakat dengan tingkat kesadaran politik yang kurang itu masih cukup banyak, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya golongan masyarakat yang selalu menyuarakan keadilan politik. Golongan masyarakat yang aktif menyuarakan kondisi politik tersebutlah yang menjadi penyeimbang antara kelompok yang apatis terhadap politik dengan yang aktif peduli terhadap keadilan politik.

Kelompok masyarakat yang aktif menyuarakan keadilan politik ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial di era Budi Utomo. Pada zaman tersebut terbentuk organisasi Budi Utomo yang menjadi wadah diskusi politik dan perjuangan kemerdekaan bagi kaum terpelajar mahasiswa. Kemudian berlanjut ke era orde lama dan lahirnya tritura di tahun 1966. Di masa ini keadaan politik sangat tegang dengan ditandai adanya inflasi yang melambung tinggi disertai kondisi pasca peristiwa G30S PKI. Hal tersebut menimbulkan aksi demonstrasi besar yang dipimpin oleh organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia akibat dari keputusan presiden Soekarno yang dianggap lamban mengambil sikap. Kemudian aksi demonstrasi juga ada pada era orde baru atau yang biasa dikenal sebagai era dengan kontrol politik yang ketat. Hal tersebut

lantaran ruang untuk berpendapat, berorganisasi, dan berdemonstrasi sangat dibatasi. Di masa ini, protes terhadap kebijakan pemerintah terus bermunculan. Organisasi mahasiswa juga secara terang-terangan berani menyuarakan kritik terhadap praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Puncak dari perlawanan di era orde baru ini adalah Gerakan Reformasi 1998 yang sampai menewaskan 4 mahasiswa yang memicu amarah publik dan menyebabkan ribuan mahasiswa menduduki dan menguasai gedung DPR/MPR RI. Setelah jatuhnya era orde baru 1998, selanjutnya adalah memasuki masa Era Reformasi (1988 – sekarang). Di masa ini ditandai dengan kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Demonstrasi di masa ini tidak lagi dinilai menjadi hal yang tabu dan bahaya.

Dari sejarah demonstrasi di Indonesia tersebut menjelaskan bahwa bentuk protes publik terhadap kebijakan pemerintah sudah terjadi sejak lama. Namun dari rentetan kebijakan yang di protes oleh masyarakat sejak dulu, terdapat gejala protes dari masyarakat yang tidak kalah besarnya yang terjadi di tahun 2025. Pemicu utamanya adalah dari sejak pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 20 Maret 2025. Pengesahan tersebut dinilai oleh masyarakat sebagai upaya untuk menghidupkan kembali dwifungsi ABRI era orde baru, karena salah satu poin utamanya adalah untuk memperluas pos jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI aktif dari 10 menjadi 16 lembaga negara (Tempo, 2025). Kekesalan masyarakat semakin memanas karena pembahasan Undang-Undang tersebut digelar secara tertutup di Hotel Fairmont Jakarta Pusat tanggal 14-15 Maret 2025, yang semakin menguatkan persepsi publik bahwa pemerintah masih bersikap

tidak peduli atau kurang mendengarkan aspirasi rakyat. Dari kejadian tersebut demonstrasi di beberapa tempat akhirnya tidak bisa dihindarkan di kota Yogyakarta, Bandung, Malang, dan Surabaya.

Puncak dari kemarahan publik adalah terjadinya demonstrasi besar-besaran yang terjadi di akhir bulan Agustus 2025. Banyak pemicu dari demonstrasi ini, terutama yakni kebijakan rencana kenaikan tunjangan DPR yang dinilai tidak sesuai dengan realitas di kehidupan ekonomi masyarakat. Tunjangan yang hendak disahkan terbilang tidak sedikit karena meliputi tunjangan rumah, transportasi dan gaji. Besarnya jumlah tunjangan yang diberikan kepada DPR tidak sebanding dengan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia yang masih lemah. Hal itu yang pada akhirnya memicu kemarahan masyarakat dan menimbulkan demonstrasi besar-besaran oleh rakyat. Kemudian diperparah lagi dengan insiden kematian Affan Kurniawan, seorang *driver* ojek online, akibat dilindas oleh Kendaraan Taktis Brimob di Jakarta pada 28-30 Agustus 2025. Menurut data Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa ada sekitar 107 demonstrasi yang sudah terjadi di 32 provinsi di seluruh Indonesia akibat dari peristiwa ini (Afandi, 2025).

Hal yang membedakan protes masyarakat dari demonstrasi sebelumnya adalah peran dari media sosial TikTok sebagai ruang digital untuk membentuk sebuah narasi perlawanan. Dari banyaknya aksi demonstrasi tersebut lahirlah gerakan tuntutan 17+8 yang viral di berbagai media sosial. Tuntutan ini lahir dari kekecewaan, jeritan rakyat atas ketidakadilan, dan masalah ekonomi hingga negara yang tak kunjung selesai. Tuntutan ini diinisiasi oleh beberapa *influencer* seperti

Jerome Poline, Salsa Erwina Hutagalung, Andovi Dalopez, Abigail Limuria, Fathia Izzati, dan Andhyta Firselly Utami pada diskusi online (Afandi, 2025). Postingan tentang tuntutan 17+8 tersebut tidak butuh waktu lama untuk menjadi viral dan diunggah ulang oleh banyak warganet. Dari peristiwa ini menunjukkan bahwa media sosial mampu untuk membentuk sekaligus menggerakkan wacana perlawanan.

Partisipasi warganet dalam wacana politik di dunia digital memang bukan suatu fenomena yang baru. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menggunakan internet dan mengakses sosial media, dapat mempengaruhi partisipasi dan proses politik terutama di kalangan generasi muda yang paling banyak aktif di media sosial (Saud et al., 2020). Namun, partisipasi ini juga dapat membawa tantangan yang cukup serius. Melansir dari artikel berita Tempo (Trikarinaputri, 2025) Loina selaku Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang menuturkan bahwasannya total misinformasi terbanyak adalah tentang politik dengan jumlah 773 hoaks atau 48,5 persen dari total hoaks dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Lebih lanjut, rincian target dari hoaks yang membahas mengenai politik tersebut menunjukkan paling banyak menyasar ke pemerintahan dengan total 374 temuan. Dari temuan tersebut menunjukkan gambaran betapa besarnya tantangan dalam menjaga stabilitas opini publik mengingat narasi politik yang menyimpang cenderung mendominasi konsumsi publik.

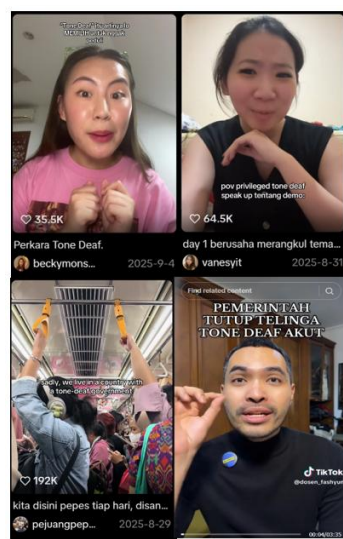
Partisipasi masyarakat mengenai politik di dunia digital tidak hanya membuat informasi menyebar lebih cepat, tetapi juga dapat menimbulkan sebuah perdebatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai tantangan media sosial

sebagai ruang diskusi politik masyarakat, perdebatan politik seperti perbedaan pendapat dapat memicu menjadi sebuah pertengkaran. Karena semua pengguna media sosial dapat dengan mudah untuk berkomentar mengenai isu politik yang sedang dibahas. Dari perdebatan ini membuat pengguna media sosial atau masyarakat menjadi bebas, cepat, dan lebih berani untuk menyampaikan kritik terhadap isu/kebijakan yang diperdebatkan.

Menurut Sugiwardana (2014) dalam (Pratama et al., 2023) mendefinisikan kritik sosial sebagai bentuk komunikasi yang mempunyai tujuan sebagai kontrol jalannya suatu sistem sosial. Lanjutnya, kritik sosial dapat pula dimaknai sebagai tanggapan atas sesuatu yang dianggap tidak sesuai dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, bisa berupa kritikan, masukan, sanggahan, penilaian, dan sindiran. Sedangkan kritik politik adalah kritik yang ditujukan untuk bidang politik, yang mana berkaitan dengan kebijakan. Menurut teori Budiarjo, kritik politik mencakup 5 dimensi, diantaranya yaitu kritik terhadap negara, kritik terhadap kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan alokasi (Budiarjo dalam Rohmah & Sugirti, 2025).

Dari banyaknya kritik yang disuarakan pengguna media sosial tersebut akhirnya memunculkan suatu narasi baru, seperti tagar yang dipakai serentak oleh para pengguna media sosial dengan tujuan sebagai alat kritik politik yang ampuh dan cepat menyebar luas. Narasi *tone deaf* lahir bukan hanya sekedar tren saja, melainkan sebagai simbol perlawanan untuk memberikan tekanan pada pemberi isu/kebijakan yang dirasa merugikan masyarakat.

Istilah ini secara harfiah memiliki arti ‘buta nada’, namun dalam konteks politik bertransformasi menjadi alat kritik politik atas ketidakpekaan seseorang terhadap situasi politik. Namun, menariknya dari penggunaan istilah ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah dan elit politik saja tetapi juga kepada masyarakat yang bersikap apatis terhadap kebijakan yang tidak adil.



Gambar 2. Konten membahas tentang narasi tone deaf

Sumber: TikTok

Gambar diatas adalah contoh dari beberapa konten yang ada di platform TikTok yang membahas mengenai narasi *tone deaf*. Bentuk isi dari konten tersebut juga beragam, ada yang menyampaikan narasinya dengan sindiran, ada pula berupa edukasi untuk warganet tentang *tone deaf* itu sendiri.

Salah satu peristiwa yang menjadi pemantik penggunaan narasi *tone deaf* ini semakin viral di media sosial adalah adanya video viral dari sejumlah anggota DPR yang berjoget usai Sidang Tahunan MPR pada tanggal 15 Agustus 2025. Melansir dari artikel berita VOI.id, aksi joget yang dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut langsung memantik amarah publik karena dinilai sangat tidak berempati di tengah tekanan ekonomi masyarakat yang semakin berat (Ros, 2025).



Gambar 3. Respon Ahmad Sahroni

Sumber: LamonganTerkini.com

Sikap lain dari para wakil rakyat tersebut yang membuat warganet semakin geram ialah disaat Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, ketika kunjungan kerja di Polda Sumut, ia menyebutkan bahwa orang-orang yang mengkritisi agar DPR dibubarkan adalah 'orang tolol sedunia'. Dari pernyataan tersebut dengan cepat memicu amarah warganet dan kompak menyerang akun sosial media milik Ahmad Sahroni. Sindiran *tone deaf* semakin banyak dilontarkan ke Anggota Komisi III DPR RI tersebut ketika Ia memamerkan motor mewah d`i tengah isu kenaikan tunjangan DPR (Iksan, 2025)

Mengingat kebijakan pemerintah yang membuat resah masyarakat, akan menjadi sebuah keharusan bagi rakyat untuk terus menyuarakan ketidakadilan yang mereka rasakan ke para elit politik tersebut. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan memilih untuk mengabaikan seruan atau aksi menolak kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Perilaku masyarakat yang ikut *tone deaf* ini banyak ditemukan saat terjadi demonstrasi mahasiswa belakangan ini. Contoh yang sering terjadi adalah munculnya komentar yang meremehkan seperti “buat apa demo, hasilnya tetap sama” atau bahkan menjadikan aksi tersebut sebagai bahan lelucon dan konten viral. Contoh lainnya yakni saat ketika aksi penolakan revisi UU TNI di Jakarta pada bulan Maret lalu, yang memperlihatkan bagaimana suara rakyat sering tidak mendapat respon yang tepat (Novelia, 2025).

Munculnya beberapa kebijakan pemerintah yang memicu keresahan masyarakat mengharuskan mereka untuk sadar akan pentingnya dampak dari kebijakan tersebut di aspek kehidupan mereka. Karena dampak dari kebijakan yang diambil secara sepihak tanpa melibatkan aspirasi masyarakat akan berdampak buruk mulai dari aspek ekonomi, sosial, bahkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini kemudian ditangkap oleh para konten kreator di media sosial TikTok. Mereka memanfaatkan TikTok untuk menyuarakan keresahan sekaligus berusaha mengedukasi kelompok masyarakat yang masih saja tidak peduli dengan situasi politik yang sedang tidak baik-baik saja. Melalui konten video yang berupa edukasi maupun sindiran, para konten kreator ini berusaha untuk mengubah ketidaktertarikan masyarakat agar mereka lebih “melek” politik dan tidak menjadi warga yang diam saja saat hak-haknya terancam.

Penulis mengamati bahwa konten-konten yang dihasilkan oleh para konten kreator di TikTok pada saat terjadinya ketidakadilan politik akibat adanya kebijakan pemerintah yang meresahkan, bertransformasi menjadi bentuk perlawanan digital. Dalam masa demonstrasi yang terjadi, istilah *tone deaf* muncul sebagai alat kritik politik yang digunakan untuk menyadarkan pemerintah dan kelompok masyarakat yang apatis agar menyadari bahwa dampak dari kebijakan tersebut bisa mengenai semua lapisan masyarakat. Berangkat dari fenomena ini, penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk membedah konstruksi wacana *tone deaf* di dalam konten-konten video TikTok, guna memahami bagaimana narasi tersebut digunakan sebagai alat untuk menggerakkan kesadaran sekaligus melawan kebijakan pemerintah yang meresahkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis wacana digital yang dikemukakan oleh Rodney H. Jones untuk mengungkapkan bagaimana penggunaan istilah *tone deaf* ini bisa menjadi alat kritik politik. Analisis wacana ini bertujuan untuk menentukan bagaimana suatu teks bisa diproduksi dan dikonsumsi oleh pengguna media. Rodney H. Jones dalam bukunya yang berjudul *Discourse and Digital Practices (Doing Discourse Analysis in the Digital Age)* mengungkapkan terdapat 4 elemen dalam menganalisis wacana digital, yakni teks, konteks, aksi dan interaksi, serta ideologi dan kekuasaan.

Dalam konteks akademis, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji karena untuk mengisi kekosongan kajian mengenai wacana penggunaan istilah *tone deaf* dalam konteks perlawanan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di media sosial TikTok. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam

bagi pengguna media sosial, khususnya aktivis, politis, dan masyarakat umum tentang bagaimana istilah *tone deaf* itu digunakan sebagai alat kritik politik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana analisis wacana digital perlawanan warganet terhadap kebijakan pemerintah melalui narasi *tone deaf* pada platform TikTok pada tahun 2025.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis wacana digital perlawanan warganet terhadap kebijakan pemerintah melalui narasi *tone deaf* pada platform TikTok pada tahun 2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi mengenai wacana digital melalui media
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan kemampuan mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam melakukan penelitian terhadap suatu konten melalui analisis wacana digital
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti dan penulis selanjutnya

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan isi dari konten-konten yang beredar sekaligus pemanfaatan media dalam melakukan kritik politik.